

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sektor perikanan dan pangan merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Solok. Namun dalam pelaksanaan pelayanan sekaitan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perikanan dan Pangan masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang mengancam ketersediaan pangan daerah. Lahan pertanian Kabupaten Solok saat ini berdasarkan Database Pertanian tahun 2012 seluas 334.369 ha dan pada tahun 2016 menjadi seluas 334.055 ha. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi tentang lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Solok.
2. Belum memadainya sarana dan prasarana perikanan
3. Terbatasnya dukungan APBD Kabupaten dalam menunjang kegiatan sektor perikanan dan pangan
4. Masih rendahnya kuantitas aparatur yang menangani perikanan dan pangan
5. Masih terbatasnya SOP dalam pengembangan perikanan
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi perikanan di tengah masyarakat
7. Belum tersedianya alat uji mutu hasil dan keamanan pangan
8. Belum adanya petugas pengawas mutu dan keamanan pangan
9. Belum tercukupinya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dengan jumlah saat ini sebanyak 30 ton sementara berdasarkan SPM sampai tahun 2015 cadangan pangan pemerintah kabupaten berjumlah 100 ton.
10. Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
11. Masih tingginya ancaman terhadap hama dan penyakit ikan
12. Masih adanya daerah yang mengalami kerawanan pangan yang mengakibatkan kondisi ketahanan pangan menjadi sangat rentan
13. Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat dan perlu dikembangkan diversifikasi pangan
14. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM perikanan dan pangan serta rendahnya kemampuan wira usaha (enterpreneuership)
15. Masih rendahnya mutu dan keamanan produk hasil perikanan dan pangan
16. Belum adanya regulasi tentang Perikanan Kabupaten Solok
17. Masih rendahnya keanekaragaman produk olahan hasil perikanan

18. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna perikanan dan pangan
19. Masih rendahnya kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan dan kelembagaan pangan lainnya
20. Adanya umbalan /upwelling di waktu tertentu yang mengakibatkan kematian ikan secara massal di danau
21. Pengelolaan lumbung yang belum mampu memenuhi permintaan masyarakat pada daerah rawan transien (sementara)
22. Sedikitnya jumlah toko yang bekerjasama dengan lembaga usaha pangan masyarakat
23. Rendahnya tingkat pengelolaan dan pemanfaatan pekarangan oleh keluarga
24. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang penganeekaragaman pengolahan bahan pangan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam penentuan kebijakan dan strategi dalam membangun perikanan dan pangan di Kabupaten Solok kedepan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan.

Dari permasalahan pada sektor perikanan dan pangan, maka isu strategis yang menjadi acuan dan perhatian utama sebagai daerah dengan sumber mata pencaharian penduduknya ada pada sektor pertanian, dibutuhkan perhatian dan keseriusan yang lebih besar agar mampu mengembangkan pertanian (pertanian, peternakan, perikanan) yang berkualitas, bernilai tambah tinggi dan berdaya saing dengan berbasis sumberdaya lokal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Agenda Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2011-2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah pada tahap ketiga.

Berbagai isu global dan nasional perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Solok menuangkan visi yang hendak dicapai dalam RPJMD 2016-2021 yaitu ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju Menuju Kehidupan Masyarakat Madani dalam Nuansa Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah.***

Untuk mewujudkan visi, maka perlu adanya misi tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha untuk mewujudkannya. Misi juga memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Solok, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mensukseskan program wajib belajar (wajib) 12 tahun.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.
3. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan infrastruktur yang memadai
4. Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah”, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) kuat dengan meningkatkan peran Tungku Sajarangan (ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
5. Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good clean governance)

Program prioritas yang dilaksanakan guna mendukung visi misi ini dilaksanakan melalui Empat Pilar Pembangunan Kabupaten Solok yakni :

1. Pilar Pendidikan
2. Pilar Kesehatan
3. Pilar Ekonomi Kerakyatan dengan program prioritas: a). Penguatan Kedaulatan Pangan, b). Peningkatan Infrastruktur Daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi, c). Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pembangunan
4. Pilar Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan adalah mendukung pencapaian kebijakan Empat Pilar Pembangunan yakni pilar ketiga, **Pilar Ekonomi Kerakyatan** dengan tiga program prioritas guna mendukung penguatan kedaulatan pangan dari sektor perikanan dan pangan, peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung perikanan dan pangan serta pengurangan tingkat kemiskinan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil produk perikanan.

Pilar ekonomi kerakyatan ini merupakan bagian dari **Misi Ketiga** pembangunan Kabupaten Solok yakni *Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai* melalui berbagai program kegiatan, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan.

Telaahan terhadap visi, misi dan tujuanBupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2016-2021 dalam hubungannya dengan tugas pokok danfungsi dari pelayanan Dinas Perikanan dan PanganKabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 10. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Agenda Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2016-2021

Visi:Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat yang Madani dalam Nuansa Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah				
N o	Misi dan Agenda Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2016-2021	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 3. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai</p> <p>Tujuan 1. Memperkuat kedaulatan pangan</p> <p>Tujuan2. Mewujudkan pembangunan pertanian dan perikanan berbasis kawasan dengan fokus komoditas</p>	<p>a. Alih fungsi lahan ke non pertanian</p> <p>b. Penggunaa n sarana produksi dan teknologi tepat guna belum optimal</p> <p>c. Infrastrukt ur yang belum memadai</p> <p>d. Penangana n pasca produksi dibidang pengolahan danpemasa ran hasil belum optimal</p> <p>e. Masih berkemban gnya hama dan penyakit pada ikan.</p> <p>f. Masih rendahnya kualitas</p>	<p>a. Belum adanya regulasi di daerah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan</p> <p>b. Mahalnya agroinput(sar ana produksi danalat mesin)</p> <p>c.Menurunnya minatertahada p usaha tani (termasuk perikanan)</p> <p>d. Kemampuand an akses petani terhadap permodalan masih terbatas.</p> <p>e.Penerapan teknologitepat guna terbatas</p> <p>f. Usaha perikananma sih merupakan usaha sampingan</p> <p>g.Keterbatasan</p>	<p>a. MoU antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah dalam peningkatan produksi menuju pencapaian ketahanan pangan</p> <p>b. Komitmenpimpinandala m peningkatanketahanang an.</p> <p>c. Ketersediaan sumber dayaperikanan</p> <p>d. Produksi pangan utama (beras) yang surplus</p> <p>e. Ketersediaan lembaga penelitian dan pengkajian teknologi pertanian (BPTP)</p> <p>f. Dukungan Pemerintah Pusat dan propinsi dalam pembiayaan</p> <p>g. Ketersediaanunit kerja sampai ke wilayah kecamatan (Balai Benih Ikan)</p>

	unggulan	<p>sumberdaya dan kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan</p> <p>g. Pengelolaan sumberdaya perikanan yang tidak ramah lingkungan</p> <p>h. Masih rendahnya mutu dan keamanan produk pangan</p> <p>i. Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat</p> <p>j. Harga pangan yang masih berfluktuasi</p>	<p>sumberdaya manusia dalam pengawasan keamanan produk pangan</p> <p>h. Belum adanya regulasi di daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum daratan</p> <p>i. Belum semua produk pangan punya ketetapan Harga Pembelian Pangan (HPP) oleh pemerintah</p>	
--	----------	--	---	--

3.3. Telaahan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan dalam RPJMD Kabupaten Solok

RPJMD tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi Renstra Dinas Perikanan dan Pangan tahun 2016-2021 yang artinya indikator kinerja Dinas Perikanan dan Pangan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perikanan dan Pangan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Solok, Dinas Perikanan dan Pangan berkontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut: (1) Meningkatnya SDM aparatur dalam pengelolaan administrasi pemerintahan; (2) Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk komoditi unggulan; (3) Mencari

peluang pasar dan akses pemasaran produk perikanan dan pangan; (4) Meningkatnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna; (5) Mengembangkan kawasan sentra produksi perikanan; (6) Melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perikanan dan pangan; dan (7) Meningkatnya kegiatan pencegahan dan pemberantasan serta pengendalian hama/penyakit pada ikan.

Berdasarkan telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 terdapat beberapa faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari Dinas Perikanan dan Pangan yang mempengaruhi pelayanan dinas ditinjau dari sasaran RPJMD. Adapun faktor-faktor yang terkait sebagai penghambat dan pendorong dirinci pada tabel berikut:

Tabel 11. Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Ditinjau dari Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terjaganya ketersediaan pangan	1. Masih rendahnya mutu dan keamanan produk pangan	1. Mahalnya agroinput (saranaproduksi, peralatan dan mesin)	1. Ketersediaan sumber dayaperikanan dan pangan
2.	Peningkatan diversifikasi pangan	2. Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat	2. Semakin tingginya alih fungsi lahan	2. Ketersediaan dukungan anggaran dari pusat danpropiinsi.
3.	Meningkatkan keamanan pangan segar	3. Keterbatasan ketersediaan anggaran daerah untuk pembangunanperikanan	3. Kemampuanpermodalan petani terbatas	3. Produksi pangan utama (beras) yang surplus
4.	Meningkatkan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan	4. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	4. Masih adanya daerah yang mengalami kerawanan pangan	4. Ketersediaan Lembaga Penelitian dan Pengkajia
5.	Meningkatkan pelayanan publik yang prima ditingkat Nagari, Kecamatan	5. Penggunaan sarana produksi dan teknologi tepat guna belum optimal.		
6.		6. Penanganan pasca produksi		

	dan Kabupaten Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas	dibidang pengolahan dan pemasaran hasil belum optimal 7. Masih berkembangnya hama dan penyakit pada ikan 8. Masih rendahnya kualitas sumberdaya kelembagaan 9. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan		n Teknologi Pertanian 5. Ketersediaan bantuan fasilitas sarana prasarana perikanan 6. Ketersediaan unit kerja sampai ke wilayah kecamatan (Balai Benih Ikan).
--	---	---	--	---

Tabel 12. Keterkaitan Program Renstra Dinas Perikanan dan Pangan dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

Misi ke 3 RPJMD : Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana danprasarana infrastruktur yang memadai							
N o	Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
1	Memperkuat kedaulatan pangan	Terjaganya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama (beras)	Peningkatan ketersediaan pangan	Mengembangkan ketersediaan pangan pada kondisi khusus	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Penurunan jumlah penduduk rawan pangan
				Peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan	Mengoptimalkan pendampingan distribusi pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Stabilitas harga dan pasokan pangan produk (HPP) ditingkat produsen& konsumen
					Meningkatkan aksesibilitas pangan	Program Peningkatan efesiensi Perdagangan dalam Negeri	Fluktuasi harga ditingkat konsumen (Coefisien Variasi/CV)
		Peningkatan diversifikasi pangan	Skor PPH	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam dan berkualitas berbasis	Memanfaatkan pekarangan dan mengembagkan panganekaragaman	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Model pengembangan

				pangan lokal	pangan lokal		
		Meningkatkan keamanan pangan segar			Mengembangkan penganekaragaman olahan pangan lokal	Program Peningkatan Pemberdayaan Masy. Pedesaan/ nagari	Cakupan kelompok dasawisma yang dibina
				Peningkatan Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar	Meningkatkan pengawasan mutu dan standarisasi produk petanian	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Jumlah kelompok tani yang menerapkan standarisi produk pertanian
					Meningkatkan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan pangan segar asal hewan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Bahan pangan segar yang aman dikonsumsi
2	Mewujudkan pembangunan pertanian dan perikanan berbasis kawasan dengan fokus komoditas unggulan dan andalan	Meningkatkan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan	PDRB pertanian , kehutanan dan perikanan	Peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan umum yang berkelanjutan	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi usaha kecil pembudidaya ikan dan nelayan kecil	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya : - Ikan mas - Ikan nila
			Nilai Tukar Petani (NTP)		Meningkatkan penyediaan benih, induk ikan dan pengembangan logistik benih ikan		
					Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit ikan		
					Mengendalikan kesehatan lingkungan budidaya perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan perairan umum

				Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan/agroindustri Tri	Meningkatkan sarana dan prasarana agroindustri	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan usaha kelompok agribisnis yang dikembangkan
					Meningkatkan mutu, standarisasi, promosi, kemitraan dan jaringan pasar produk		
Misi ke 5 RPJMD : Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good and clean governance)							
2	Mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta pro rakyat	Meningkatkan pelayanan publik yang prima ditingkat nagari, kecamatan dan kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pelaksanaan kinerja sesuai tugas dan fungsi	Program pelayanan dan peningkatan tugas dan fungsi	Persentase pelayanan
				Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Jumlah SKPD yang ditingkatkan sarana prasarannya
		Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang profesional	Komposisi aparatur fungsional dan struktural di luar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan	Peningkatan mutu dan pengelolaan kepegawaian untuk pemenuhan pelayanan prima	Meningkatkan pengembangan mutu dan pengelolaan kepegawaian	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia	Persentase pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu: **“Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”**. Dalam mencapai visi

tersebut, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah: (1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri; (2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga; (3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2019). Adapun target kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama tersebut sebagai berikut:

Tabel 13. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2015-2019

N o	Indikator Kinerja Utama	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Skor PPH ketersediaan	87,52	89,71	92,04	94,25	96,32
2.	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan (%)	1	1	1	1	1
3.	Stabilnya harga pangan (Gabah/Beras) ditingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
4.	Stabilnya harga pangan (Beras) di tingkat konsumen	CV<5%	CV<5%	CV<5%	CV<5%	CV<5%
5.	Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.004	2.040	2.077	2.113	2.150
6.	Konsumsi Protein (gram/kap/hr)	56,1	56,4	56,6	56,8	57,0
7.	Skor PPH Konsumsi	84,1	86,2	88,4	90,5	92,5
8.	Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang terserifikasi	81	160	245	330	400

Dalam upaya mendukung dan terarahnya pelaksanaan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan pada dinas-dinas terkait di lingkup Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat juga menetapkan rencana strategisnya mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Propinsi Tahun 2016-2021 dan dikaitkan dengan rencana strategis pada kementerian/lembaga.

Guna menjawab beragam tantangan pembangunan kedaulatan pangan Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam jangka menengah (2016-2021) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13. Visi, Misi, tujuan dan Sasaran DinasKetahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
"Terwujudnya Institusi yang Handal dalam Memantapkan Kemandirian PanganMasyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal"	1. Mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	1. Meningkatkan penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam 2. Meningkatnya penanganan masyarakat rawan pangan
	2. Mewujudkan keterjangkauan pangan masyarakat.	2. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok	3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen
	3. Mewujudkan keamanan pangan segar	3. Meningkatkan keamanan pangan segar	4. Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat
	4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal	4. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, seimbang dan aman) berbasis	5. Meningkatnya diversifikasi pangan

		sumberdaya lokal	
--	--	---------------------	--

Adapun Indikator kinerja serta target kinerja sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun (2016-2021) adalah sebagai berikut:

Tabel14 : Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Ketersediaan Energi (Kkal/kap /hari)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Ketersediaan Protein (Gram/kap /hari)	63	63	63	63	63	63
		Meningkatnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumbar (ton)	22	100	100	100	100	100
		Ketersediaan Pangan Utama (Beras)/ton	1.495.021	1.558.079	1.623.127	1.690.253	1.759.378	1.831.128
2	Meningkatnya penanganan masyarakat rawan pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	25	45	65	75	85	90
		Teratasinya masyarakat rawan pangan (kk)	86	106	110	110	110	110
3	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Stabilisasi harga bahan pangan pokok (beras) di tingkat konsumen (CV)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
		Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen (≥ HPP)	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
4	Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	Meningkatnya sertifikasi keamanan pangan segar (sertifikat prima)	30	100	100	100	100	100
		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat (%)	75	76	77	78	79	80
5	Meningkatnya diversifikasi pangan	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) /%	84	84,6	85,2	85,8	86,4	87
6	Meningkatnya kualitas	Konsumsi Energi (Kkal/kap /hari)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	transparansi dan akuntabilitas pelaporan evaluasi kinerja dan sistem keuangan							
		Konsumsi Protein (Gram/ kap /hari)	52	52	52	52	52	52
7	Meningkatnya peran Badan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan (kg/kap/th)	284,25	292,79	301,58	310,64	319,97	329,58
		Tersusunnya dokumen perencanaan (Dokumen)	2	2	2	2	2	2
		Tersusunnya laporan keuangan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, berkualitas dan transparansi (Dokumen)	2	2	2	2	2	2
		Kebijakan ketahanan pangan (buah)	1	1	1	1	1	1

Pembangunan sektor perikanan juga menjadi sasaran rencana pembangunan jangka menengah Sumatera Barat tahun 2016-2021. Pada rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 sasaran yang harus dicapai yaitu: (1) Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan; (2) Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan umum; (3) Meningkatnya produksi perikanan; (4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; (5) Meningkatnya mutu produksi hasil perikanan; (6) Meningkatnya pemasaran hasil perikanan dan konsumsi pakan.

Adapun indikator kinerja utama dan target sasaran yang harus dicapai tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel15 :Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	- Kasus illegal fishing yang ditemukan (%)	55	50	45	40	35
2.	Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan umum	- Luas kawasan konservasi dan rehabilitasi (ha) - Persentase kawasan pulau-pulau kecil yang dikelola (%)	420.275,95 6,49	420.280 7,57	420.284 8,65	420.288 9,73	420.292 10,81
3.	Meningkatkan produksi perikanan	- Produksi perikanan laut (ton) - Produksi perairan umum (ton) - Produksi perikanan budidaya (ton)	207.144,1 10.806 321.760,92	209.629,8 10.957 357.991,2	212.145,4 11.111 398.444,21	214.691,1 11.266 444.265,29	217.267,4 11.424 496.422,04
4.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	- Pendapatan nelayan : <ul style="list-style-type: none">• Nelayan Pemilik (Rp/kk/bln)• Nelayan Buruh (Rp/kk/bln) - Pendapatan pembudidaya (Rp/kk/bln)	8.600.000 1.850.000 3.000.000	9.200.000 1.970.000 3.200.000	9.800.000 2.230.000 3.500.000	10.400.000 2.375.000 4.000.000	11.000.000 2.500.000 4.500.000
5.	Meningkatkan mutu produksi perikanan	- Usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB (unit) - BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB (unit) - Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor (%)	895 70 96	905 90 97	915 110 98	925 130 99	935 150 100
6.	Meningkatnya pemasaran hasil perikanan dalam dan luar negeri	- Ekspor hasil perikanan (ton) - Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	2.500 35,16	2.625 35,33	2.765 35,5	2.893 35,67	3.076 35,84

Untuk mensinergikan tujuan dan sasaran dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan pada Renstra Propinsi dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, perlu dilakukan komparasi indikator kinerja Dinas Perikanan dan Pangan dengan target capaian pada sasaran rencana strategis pembangunan perikanan dan ketahanan pangan pemerintah Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dan Kementerian/Lembaga terkait Tahun 2016-2021.

Tabel 16. Komparasi Target Capaian Sasaran Renstra terhadap Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, Renstra Propinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran Renstra Kabupaten	Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran Renstra Propinsi	Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Produksi perairan umum (ton) : 2016 = 447,00 2017 = 479,00 2018 = 503,00 2019 =548,00 2020 = 597,00 2021 = 627,00 Produksi perikanan budidaya (ton) 2016 = 3.776 2017 = 4.456 2018 = 5.347 2019 =6.417 2020 = 6.738 2021 = 7.075	Produksi perairan umum (ton) : 2016 = 10.806 2017 = 10.957 2018 = 11.111 2019 = 11.266 2020 = 11.424 Produksi perikanan budidaya (ton) : 2016 = 321.760,92 2017 = 357.991,2 2018 = 398.444,21 2019 = 444.265,29 2020 = 496.422,04	Produksi perikanan (juta ton) : 2015 = 24,12 2016 = 26,04 2017 = 30,29 2018 = 32,93 2019 = 39,97
2	Usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB (unit) : 2015 = 15 2016 = 20 2017 = 20 2018 = 20 2019 = 20 2020 = 20 2021 = 20	Usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB (unit) : 2016 = 895 2017 = 905 2018 = 915 2019 = 925 2020 = 935	-
3	Konsumsi ikan (kg/kap/thn) : 2015 = 32 2016 = 33 2017 = 34 2018 = 35 2019 = 36 2020 = 37 2021 = 38	Konsumsi ikan (kg/kap/thn) : 2016 = 35,16 2017 = 35,33 2018 = 35,5 2019 = 35,67 2020 = 35,84	Konsumsi ikan (kg/kap/thn) : 2015 = 40,90 2016 = 43,88 2017 = 47,12 2018 = 50,65 2019 = 54,49

4	Skor PPH : 2016 = 81,5 2017 = 82,0 2018 = 82,5 2019 = 83,0 2020 = 84,0 2021 = 85,0	Skor PPH : 2016 = 84,0 2017 = 84,6 2018 = 85,2 2019 = 85,8 2020 = 86,4 2021 = 87,0	Skor PPH ketersediaan : 2015 = 87,52 2016 = 89,71 2017 = 92,04 2018 = 94,25 2019 = 96,32
5	Jumlah ketersediaan pangan utama perkapita (kg/kap/thn): 2016 = 541,59 2017 = 554,13 2018 = 567,14 2019 = 580,64 2020 = 594,47 2021 = 608,65	Ketersediaan Pangan Utama (Beras) /ton : 2016 = 1.495.021 2017 = 1.558.079 2018 = 1.623.127 2019 = 1.690.253 2020 = 1.759.378 2021 = 1.831.128	-
6	Jumlah KK rawan pangan yang dibantu : 2016 = 100 kk 2017 = 100 kk 2018 = 100 kk 2019 = 100 kk 2020 = 100 kk 2021 = 100 kk	Teratasinya masyarakat rawan pangan (KK): 2016 = 86 kk 2017 = 106 kk 2018 = 110 kk 2019 = 110 kk 2020 = 110 kk 2021 = 110 kk	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan: 2015= 1% 2016 = 1% 2017 = 1% 2018 = 1% 2019 = 1%
7	Fluktuasi harga pangan (beras) ditingkat konsumen (CV) : 2016 = 5,8% 2017 = <10% 2018 = <10% 2019 = <10% 2020 = <10% 2021 = <10%	Stabilnya harga pangan (gabah/beras) ditingkat konsumen : 2015= CV<5% 2016 = CV<5% 2017 = CV<5% 2018 = CV<5% 2019 = CV<5%	Stabilnya harga pangan (gabah/beras) ditingkat konsumen ; 2015= CV<5% 2016 = CV<5% 2017 = CV<5% 2018 = CV<5% 2019 = CV<5%
8	Konsumsi energy (Kkal/kap /hari) : 2016 = 2.000 2017 = 2.000 2018 = 2.000 2019 = 2.000 2020 = 2.000 2021 = 2.000	Konsumsi energy (Kkal/kap /hari) : 2016 = 2.000 2017 = 2.000 2018 = 2.000 2019 = 2.000 2020 = 2.000 2021 = 2.000	Konsumsi energy (Kkal/kap /hari) : 2015 = 2.004 2016 = 2.040 2017 = 2.077 2018 = 2.113 2019 = 2.150
9	Konsumsi protein (Gram/ kap /hari) 2016 = 52 2017 = 52 2018 = 52 2019 = 52 2020 = 52 2021 = 52	Konsumsi protein (Gram/ kap /hari) 2016 = 52 2017 = 52 2018 = 52 2019 = 52 2020 = 52 2021 = 52	Konsumsi protein (Gram/ kap /hari) 2015 = 56,1 2016 = 56,4 2017 = 56,6 2018 = 56,8 2019 = 57,0

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan, peluang, tantangan, strategi dan kebijakan pada renstra propinsi dan K/L terkait serta komparasi terhadap target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun

2016-2021 maka diperoleh faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok yang mempengaruhi pelayanan Dinas yaitu:

1. Terdapat sinergitas antara Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi dengan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok.
2. Dukungan dana APBN dan APBD Propinsi yang cukup untuk pembangunan perikanan dan ketahanan pangan.

Sedangkan faktor penghambat yang ditemui pada pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok ditinjau dari kebijakan kementerian/lembaga dan propinsi adalah terbatasnya ketersediaan dana operasional dan pendamping pada APBD kabupaten untuk pendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Solok.

Berdasarkan kajian terhadap RPJMN, renstra kementerian tahun 2015-2019 serta Renstra Propinsi terdapat beberapa hal yang perlu dicapai dalam pembangunan perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Solok yaitu :

1. Terwujudnya kedaulatan pangan melalui produksi pangan lokal.
2. Peningkatan konsumsi pangan dan ikan untuk kecukupan gizi masyarakat.
3. Peningkatan daya saing, nilai tambah dan pemasaran hasil produk sebagai antisipasi pasar bebas.
4. Tersedianya sarana prasarana perikanan dan pangan guna mendukung peningkatan dan pemasaran produk dan terwujudnya pembiayaan petani yang fleksibel dan sederhana.
5. Terwujudnya kawasan perikanan dalam meningkatkan ketersediaan bibit, keberlanjutan budidaya dan meningkatkan daya saing produk.
6. Terkendalinya hama dan penyakit ikan melalui peningkatan cara budidaya yang baik.
7. Terjaminnya mutu dan keamanan produk bahan asal pertanian dan ikan sesuai standar.
8. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.
9. Peningkatan SDM dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan dan pangan.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan perikanan dan kedaulatan pangan tidak terlepas dari ketersediaan lahan. Pemanfaatan lahan di Kabupaten Solok telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Solok adalah untuk mewujudkan Kabupaten Solok sebagai sentra komoditas pertanian dan pengembangan sektor pariwisata yang ditunjang industri dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta diselaraskan dengan RTRWP dan RTRWN.

Salah satu kebijakan sekaitan dengan penataan ruang wilayah Kabupaten Solok adalah pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, pariwisata, dan industri dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Solok disusun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Solok. Strategi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, pariwisata, dan industri dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup meliputi:

- a. Mengembangkan budidaya pertanian diarahkan untuk terjaganya daerah sebagai bagian dari lumbung padi provinsi dan nasional serta ketahanan pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian;
- b. Mengembangkan kawasan peternakan diarahkan untuk tercapainya swasembada daging dan telur, guna pengembangan ekonomi produktif yang memiliki daya dukung tinggi terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah;
- c. Mengembangkan kawasan perikanan diarahkan untuk tercapainya kebutuhan protein, guna pengembangan ekonomi produktif yang memiliki daya dukung tinggi terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Solok terdiri atas kawasan lindung; dan kawasan budidaya. Didalam rencana pengembangan kawasan budidaya, diatur suatu kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: kawasan pertanian tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan perkebunan; kawasan perikanan dan kawasan peternakan.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas budidaya perikanan air tawar dan perikanan tangkap perairan danau. Kawasan peruntukkan budidaya perikanan air tawar dengan luas lebih kurang 10.182,5 hektar terdiri atas pengembangan kegiatan budidaya ikan di sawah; pengembangan kegiatan budidaya ikan karamba; serta pengembangan kegiatan budidaya ikan di kolam air deras; pengembangan kegiatan budidaya ikan di saluran irigasi. Kawasan peruntukkan perikanan tangkap perairan danau dengan luas lebih kurang 168,95 hektare merupakan kawasan peruntukkan kegiatan budidaya ikan keramba jaring apung (KJA).

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok tahun 2012–2031 permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan perikanan dan pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Pangan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rencana Kawasan Budidaya	1. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2. Belum adanya zonasi perairan umum danau	Pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok dan meningkatnya kebutuhan akan perumahan	Kebutuhan atas pangan yang bergizi dan beranekaragam yang semakin meningkat

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memberikan muatan substantif aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan berupa sinergitas rencana dan program bagi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang

Wilayah Daerah (RTRW) dan Renstra SKPD yang kemudian akan menjadi landasan RTRW dan Renstra SKPD.

KLHS menganalisis prediksi dampak rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup untuk menyusun mitigasi dari kebijakan atau memberikan alternatif kebijakan sehingga dampak lingkungan atau risiko yang diperkirakan akan terjadi dapat diminimalisir atau ditiadakan sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Solok tidak menimbulkan persoalanbaru di masa yang akan datang dan dapat mengurangi potensi kerugian serta kehilangan manfaat pada saat kebijakan tersebut sudah diimplementasikan.

Berdasarkan analisis KLHS permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan perikanan dan pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan berdasarkan Analisis KLHS RPJMD Kabupaten Solok beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

N o	KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Pangan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan	a. Alih fungsi lahan untuk perumahan dan lainnya b. Penggunaan sarana produksi dan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan belum optimal. c. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan punahnya biota asli perairan umum	1. Tingginya alih fungsi lahan. 2. Hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan masih berkembang. 3. Belum adanya aturan zonasi perairan umum 4. Belum adanya aturan yang jelas tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Kabupaten Solok 5. Belum adanya aturan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan terutama bagan dengan mata jaring yang kecil yang sedang berkembang di Danau Singkarak	1. Ketersediaan sumber dayaperikanan dan pangan. 2. Kewenangan Dinas dalam pengembangan perikanan berkelanjutan dan peningkatan kedaulatan pangan. 3. Ketersediaan dukungan anggaran dari pusat dan propinsi serta perbankan 4. Ketersediaan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Solok

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Pangan dan berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan, maka muncul isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi yang terjadi serta memiliki dampak bagi keberlanjutan pembangunan perikanan dan pangan dan perlu diatasi secara bertahap.

Isu-isu strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok sebagai berikut :

1. Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan

Berkembangnya bagan di wilayah Danau Singkarak yang termasuk wilayah Kabupaten Solok dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil berjumlah 232 unit dengan rincian : Nagari Kacang 33 unit, Nagari Tikalak 60 unit, Nagari Singkarak 36 unit, Nagari Saniangbaka 43 unit, Nagari Muaro Pingai 37 unit dan Nagari Paninggahan 23 unit. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Bung Hatta bekerja sama dengan Dinas Perikanan hasil tangkapan dari bagan terdiri dari 19,56% larva, 32,90% juvenil dan 47,33% ikan bilih dewasa. Artinya sebanyak 52,55% ikan yang tertangkap tidak memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan data tersebut tingkat keberlanjutan kelestarian ikan bilih sangat rendah (terancam).

2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan.

Untuk memenuhi kebutuhan benih ikan ini di Kabupaten Solok sudah dibangun Balai Benih Ikan (BBI) yang berlokasi di Nagari Sungai Janieh

Kecamatan Gunung Talang dan instalasi yang berada di Nagari Koto baru Kecamatan Kubung. Namun BBI sendiri sampai saat ini belum berfungsi optimal sehingga masih perlu ditingkatkan untuk menunjang peningkatan produksi ikan air tawar. Di samping itu masyarakat Kabupaten Solok juga sudah dapat memproduksi benih sendiri melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang sudah berjumlah 38 unit. Namun untuk memenuhi permintaan akan benih dan induk ikan di Kabupaten Solok masih belum mencukupi dan masih didatangkan dari luar daerah.

3. Masih kurangnya diseminasi teknologi perikanan di tengah masyarakat
Secara umum usaha perikanan masih merupakan usaha sampingan di samping usaha utama masyarakat Kabupaten Solok yang merupakan petani. Usaha perikanan masih dilaksanakan secara tradisional dengan skala usaha yang masih kecil. Sedangkan untuk peningkatan nilai tambah baru beberapa masyarakat yang mampu melaksanakan teknologi pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar kelayakan produk.

4. Alih fungsi lahan ke non pertanian

Merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan ke non pertanian berdampak terhadap produksi bahan pangan masyarakat yang berasal dari sektor pertanian, perikanan dan peternakan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya sangat tergantung pada lahan pertanian yang akhirnya akan mengganggu stabilitas ketahanan dan kedaulatan pangan masyarakat. Lahan pertanian Kabupaten Solok saat ini berdasarkan Database Pertanian tahun 2012 seluas 334.369 ha dan pada tahun 2016 menjadi seluas 334.055 ha.

5. Masih rendahnya mutu dan keamanan produk hasil perikanan dan pangan.

Tahun 2016 era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) resmi diberlakukan. Indonesia lebih bebas mengekspor barang dan jasa ke negara-negara anggota ASEAN. Sebaliknya, barang dan jasa dari negara-negara anggota ASEAN lebih bebas masuk ke Indonesia.

Bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA menjadi

dua sisi mata uang bagi Indonesia : satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Demikian juga halnya dengan produk perikanan dan pangan Kabupaten Solok.

Untuk menyiapkan sektor perikanan dan pangan menghadapi pasar tunggal ASEAN (MEA) diperlukan peningkatan nilai tambah terhadap komoditas andalan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman dikonsumsi, yang memiliki manfaat kompetitif sambil mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi yang diperoleh tentang produk pesaing dari negara ASEAN lainnya yang masuk ke dalam negeri dapat direspon.

Peningkatan daya saing produk lokal sangat diperlukan menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 mendatang, diantaranya: 1) meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produksi, 2) menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing, 3) memperluas jaringan pemasaran, serta 4) meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran.

6. Masih adanya daerah rawan pangan di Kabupaten Solok

Saat ini di Kabupaten Solok masih terdapat daerah rawan pangan yang perlu difasilitasi dan ditanggulangi oleh pemerintah Kabupaten Solok melalui berbagai program dan kegiatan yang akan berdampak terhadap ketahanan pangan masyarakat setempat. Berdasarkan peta rawan pangan tahun 2015 terdapat 2 kecamatan yang masih merupakan daerah rawan pangan yang meliputi kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih.

Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah sentra pertanian dan perikanan mendukung upaya pemerintah pusat dalam pencapaian kedaulatan pangan dalam upaya pengentasan rawan pangan melalui program peningkatan produksi dan produktifitas produk pertanian dan perikanan yang berdaya saing dan berbasis kawasan.

7. Masih ditemukannya pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat

Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang setiap tahun dilakukan masih ditemukan adanya kandungan zat/residu yang berbahaya yang ditemukan pangan segar yang dijual masyarakat dan demikian juga halnya dengan pangan olahan.

Teknik bercocok tanam yang banyak digunakan saat ini oleh petani di Kabupaten Solok adalah teknik budidaya yang banyak memanfaatkan zat kimia buatan seperti pupuk buatan, insektisida, fungisida, herbisida, pestisida dan zat lainnya yang mendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura. Pemanfaatan zat kimia buatan tersebut mampu merusak keseimbangan ekosistem dan mengganggu kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Hal tersebut mengganggu tujuan penyediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan bagi konsumsi masyarakat serta tujuan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber pangan nasional.

Di samping teknik budidaya produksi, bahan pangan yang beredar di pasar perlu diawasi karena adanya sebagian oknum pedagang dan produsen menambahkan zat kimia yang tidak aman dikonsumsi oleh manusia ke dalam bahan pangan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa, tampilan, dan umur penyimpanan. Rendahnya pengawasan terhadap peredaran bahan pangan yang beredar menghambat terpenuhinya tujuan penyediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat.

8. Masih rendahnya penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan ditentukan oleh skor pola pangan harapan (PPH). Untuk Kabupaten Solok skor PPH masih rendah yang disebabkan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, seimbang dan aman, kebiasaan konsumsi beras/nasi sebagai pangan pokok yang wajib dimakan setiap jadwal makan serta berkembangnya industri pangan yang siap saji.

9. Fluktuasi harga pangan pokok strategis

Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, sifat produksi yang musiman dan tidak merata antar musim, dan buruknya infrastruktur yang berkonsekuensi terhadap ongkos angkut yang tinggi, serta meningkatnya frekuensi bencana alam. Hal ini mengakibatkan aksesibilitas masyarakat secara ekonomi menurun sehingga kondisi ketahanan pangan terganggu. Tahun 2015

persentase fluktuasi harga pangan pokok strategis masih cukup tinggi yakni sebesar 30,70%.